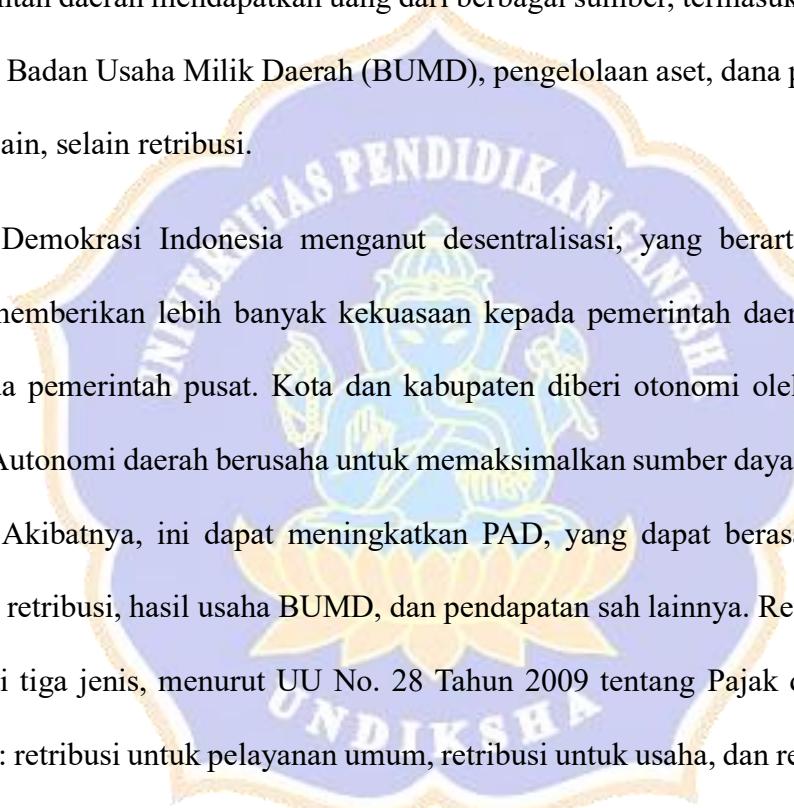


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Retribusi daerah membayar semua operasi penting pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar daerah dapat melakukan pembangunan secara mandiri. Pemerintah daerah mendapatkan uang dari berbagai sumber, termasuk pajak, usaha daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset, dana perimbangan, antara lain, selain retribusi.



Demokrasi Indonesia menganut desentralisasi, yang berarti pemerintah pusat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dan lokal daripada pemerintah pusat. Kota dan kabupaten diberi otonomi oleh pemerintah pusat. Autonomi daerah berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Akibatnya, ini dapat meningkatkan PAD, yang dapat berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil usaha BUMD, dan pendapatan sah lainnya. Retribusi dibagi menjadi tiga jenis, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah: retribusi untuk pelayanan umum, retribusi untuk usaha, dan retribusi untuk izin tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki biaya parkir di tepi jalan umum, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk PAD Kabupaten Buleleng, dan berfokus pada retribusi sebagai salah satu sumber PAD.

Sementara itu, target penerimaan untuk retribusi parkir di tepi jalan umum tidak tercapai dalam tiga tahun terakhir. Manajemen parkir di Buleleng sering melanggar aturan, termasuk pihak yang bertanggung jawab, petugas parkir yang

tidak mengikuti peraturan, dan layanan parkir yang dianggap tidak bertanggung jawab. Target 3 miliar rupiah pada tahun 2021 ditetapkan, tetapi hanya 2 193 639 000 rupiah yang digunakan dengan 73,12%, dan target 5,5 miliar rupiah pada tahun 2022 ditetapkan, tetapi hanya 2 455 676 000 rupiah yang digunakan dengan 44,65%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas layanan parkir jalan umum di Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi elemen yang berkontribusi pada pencapaian PAD di Kabupaten Buleleng.

**Tabel 1.1**

**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023**

<b>NAMA REKENING</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,193,639,000.00	2,455,676,000.00	3,245,356,242.00

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2024

Dari tabel di atas, diperlihatkan bahwa antara tahun 2021 dan 2023, kabupaten Buleleng menghasilkan Rp 7.894.671.242 dari pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Untuk mencapai target dan keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memiliki beberapa program. Berikut penjelasan tentang program-program tersebut.

1. Melakukan survei tentang potensi tempat parkir:

Hasil dari survei yang sudah dipelajari menunjukkan bahwa data tentang potensi pengumpulan retribusi parkir dapat digunakan untuk memahami potensi parkir secara riil dan menjadi acuan dalam menetapkan harga tender bagi pengelola parkir.

2. Mencari kawasan parkir yang berpotensi sebagai tempat parkir:

Untuk mengetahui potensi penghasilan dari retribusi parkir, penting untuk memahami beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan parkir. Luas area parkir, kapasitas maksimum yang dapat ditampung, tingkat pemanfaatan area, durasi parkir, dan tarif parkir adalah semua faktor ini. Salah satu masalah yang sering terjadi saat menilai potensi parkir adalah kurangnya pengelolaan data yang baik, yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Perhitungan potensi pendapatan sangat bergantung pada data yang lengkap dan penggunaan variabel yang tepat untuk menghitung biaya parkir sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan parkir, diperlukan proses pencatatan, pengawasan langsung di lapangan, dan analisis yang cermat.

3. Merencanakan peninjauan tarif retribusi parkir TJU

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan retribusi parkir

Pemberian izin khusus adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat untuk memberikan otorisasi kepada individu atau organisasi tertentu. Membina, mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai kegiatan, serta penggunaan lahan, sumber daya alam, barang, infrastruktur, dan fasilitas tertentu adalah tujuan dari pemberian izin ini. Tindakan ini diambil untuk

melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian alam.

##### 5. Memperbaiki peraturan parkir

Pengelola parkir, baik pemerintah maupun swasta, harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi parkir untuk mencegah kerugian pada kendaraan dan barang lain yang terjadi di area parkir.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk membantu pelanggan yang kehilangan kendaraan atau barang mereka saat memarkir kendaraan mereka di area parkir yang dikelola. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan pemerintah harus diubah. Dengan revisi ini, pihak yang wajib membayar retribusi tertentu atau pihak lain yang bertanggung jawab dapat mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Sasaran untuk penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Ini adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan pemerintahan dan kemajuan wilayah. Tabel berikut memberikan informasi tambahan.

**Tabel 1.2**

#### **Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 2021–2023**

No	Tahun	Target	Realisasi	Percentase (%)
1	2021	3,000,000,000.00	2,193,639,000.00	73.12
2	2022	5,500,000,000.00	2,455,676,000.00	44.65
3	2023	4,000,000,000.00	3,245,356,242.00	81.13

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2024

Tabel tersebut menunjukkan target pendapatan layanan parkir tepi jalan

umum Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 adalah Rp 3.000.000.000. Pada tahun 2022, pendapatan mencapai Rp 2.193.639.000, atau sekitar 73,12% dari target Rp 5.500.000.000. Pada tahun 2023, pendapatan mencapai Rp 2.455.676.000, atau sekitar 44,65% dari target Rp 4.000.000.000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk retribusi layanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng tahun 2021–2023 belum tercapai secara keseluruhan atau seratus persen. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan komitmen untuk menindaklanjuti pembayaran yang tidak tepat waktu.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng membuat program untuk membantunya mencapainya. Program ini juga mengelola pembayaran parkir di tepi jalan umum. Ini sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, meneliti, dan membina pendapatan daerah dan menerapkan sanksi administratif terhadap wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan.

Aspek utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa target pembayaran layanan parkir di tepi jalan umum belum tercapai. Ini mungkin karena SKPD, yang berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola keuangan daerah, tidak melakukan banyak hal. Akibatnya, unit kerja yang berhubungan belum mampu memenuhi tujuan. Selain itu, penulis menemukan berbagai gejala dan fenomena yang terjadi di berbagai industri.

1. Masih banyak orang yang parkir di jalan umum tanpa membayar uang parkir; ada petugas yang mengambil uang di luar aturan, dan warga tidak membayar

sesuai harga yang ditetapkan.

2. Penjelasan tentang pembayaran retribusi parkir kepada warga belum cukup.

Informasi tentang tarif parkir belum diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Tidak ada sumber daya yang cukup untuk pengawasan, jadi petugas parkir

illegal tetap ada.

3. Masyarakat terus merasa tidak aman saat parkir di jalan umum. Banyak orang

parkir secara sembarangan, merasa tidak nyaman, dan terjadi ketidakakuratan

dalam pengenaan tarif dan pengelolaan parkir.

4. Petugas parkir terus memberikan layanan yang buruk kepada masyarakat.

Karena sebagian besar tugas petugas parkir terkonsentrasi pada pengaturan

daripada pelayanan, fungsi pelayanan ini belum mendapat perhatian yang

cukup dari birokrasi.

Kejadian tersebut diumumkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Mengelola seluruh sistem dan subsistem sebuah organisasi adalah penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses organisasi, menurut SP Siagian (2003:448), mencakup kegiatan yang dilakukan, struktur dan pejabat, dan tujuan yang ingin dicapai. Ini adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai target tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Pendapat ini menunjukkan bahwa proses organisasi adalah gabungan dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses ini dilakukan berdasarkan prosedur, metode kerja, dan sistem yang telah diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, mekanisme kerja yang merupakan

bagian dari proses dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama dalam melakukan tugasnya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat.

Ini terbukti dengan pembayaran untuk layanan parkir di jalan umum. Tanpa sistem kerja yang efektif serta partisipasi dan kolaborasi dari seluruh komunitas, tujuan yang telah ditetapkan tidak akan bisa tercapai sepenuhnya. Berdasarkan konteks dan penjelasan di atas, penelitian dengan judul "Dampak Kinerja, Kebijakan, dan Pengawasan Terhadap Penerimaan Retribusi Untuk Layanan Parkir Di Jalan Umum Kabupaten Buleleng" dipilih untuk menunjukkan betapa pentingnya membayar retribusi untuk layanan parkir di jalan umum.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan alasan di atas, masalah yang dihadapi peneliti terkait dengan penerimaan retribusi untuk penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ada laporan dari warga tentang biaya parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng;
- 2) Warga tidak tahu tentang peraturan mengenai biaya parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng;
- 3) Warga percaya bahwa kurangnya pengawasan oleh instansi terkait menyebabkan parkir yang tidak terpantau; dan
- 4) Ada ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya tentang dampak kebijakan, kinerja, dan pengawasan terhadap pendapatan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dibuat untuk memungkinkan penelitian berkonsentrasi pada masalah yang sudah ditentukan. Penelitian ini berfokus pada batasan-batasan berikut ini sebagai tanggapan atas masalah yang telah ditemukan sebelumnya.

- 1) Efek dari tiga variabel bebas—kinerja, kebijakan, dan pengawasan—terhadap satu variabel terikat—penerimaan retribusi untuk penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum di dinas perhubungan Kabupaten Buleleng.
- 2) Proses pengumpulan data penelitian ini hanya berfokus pada kinerja dari tiga variabel bebas ini.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Di bawah ini adalah rumusan masalah penelitian:

Ini adalah rumusan masalah penelitian:

1. Apakah kinerja petugas mempengaruhi proses penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kebijakan yang diterapkan mempengaruhi proses penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengawasan yang dilakukan mempengaruhi proses penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah kinerja, kebijakan, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tiga faktor:

1. Pengaruh kinerja terhadap penerimaan retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng;
2. Pengaruh kebijakan terhadap penerimaan retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng; dan
3. Pengaruh pengawasan terhadap penerimaan retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng.
4. Pengaruh kinerja, kebijakan, dan pengawasan secara simultan terhadap penerimaan retribusi dari pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan akan memberikan penulis dan pembaca perspektif ilmiah tentang bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima retribusi, khususnya mengenai retribusi untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng. Hasilnya juga akan membantu menambah literatur manajemen.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini akan memberi penulis kesempatan untuk memahami bagaimana kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menerima retribusi, khususnya untuk retribusi layanan parkir di tepi jalan umum

di Kabupaten Buleleng.

- b. Diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan dan bahan evaluasi untuk pemerintah. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima pembayaran, khususnya pembayaran untuk layanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng
- c. Peneliti juga berharap teori yang dipelajari dapat diterapkan di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan referensi dan informasi kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.
- d. Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan tentang biaya parkir di tepi jalan umum.

## 1.7 Penjelasan Istilah

Penulis harus menjelaskan arti istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini agar tidak ada perdebatan yang tidak jelas atau salah paham, dan agar judul penelitian lebih mudah dipahami.

- a. Kinerja menunjukkan seberapa baik suatu tindakan, program, atau kebijakan berhasil mencapai target, tujuan, visi, dan misi organisasi dalam perencanaan strategisnya.
- b. Kebijakan adalah kumpulan konsep dan prinsip dasar yang berfungsi sebagai panduan utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Pengawasan: Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa tugas dan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kebijaksanaan, dan peraturan yang sudah ditetapkan.

- d. Retribusi: Kebijakan pemerintah untuk mendapatkan uang dari masyarakat untuk layanan atau barang yang diberikan oleh pemerintah dikenal sebagai retribusi daerah.
- e. PAD: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.8 Rencana Publikasi

Tujuan dari rencana publikasi ini adalah untuk menentukan jurnal mana yang akan digunakan sebagai referensi untuk artikel hasil penelitian. Penelitian ini harus dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal terakreditasi SINTA 3 yang diterbitkan oleh International Journal of Economics Development Research (IJEDR), yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual. Jurnal dapat diakses melalui URL berikut: <https://journal.yrpipku.com/index.php/ijedr/>.